

RENSTRA 2024-2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



JL.HARAPAN BARU BLOK B NO. 15 KOMPLEKS SKPD SIDRAP

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan bagian dari mewujudkan aspirasi masyarakat melalui pencapaian visi dan misi . Penetapan dan pengembangan system perencanaan yang tepat , jelas dan proporsional merupakan prasyarat menuju penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan program kegiatan yang berkesinambungan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut diatur dalam Peraturan Berdasar Inmendagri Nomor 51 Tahun 2022 bahwa(1) RPD Kabupaten /Kota Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Berlakunya regulasi tersebut maka membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 Perangkat Daerah (SKPD) , yang di dalamnya memuat sasaran –sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perangkat Daerah harus berpedoman pada Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terima kasih
Pangkajene Sidenreng 2023
Kepala Dinas Komunikasidan Informatika



H.BACHTIAR,SHi,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP.19710122 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD	26
3.2 Penentuan Isu-isu Strategi	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28
4.2 Cascading Kinerja PD	28
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
6.1 Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sidrap Tahun 2019-2023	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	55

...

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yaitu dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah berakhir 2023, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah tahun 2023 dan Daerah otonom baru (DOB).

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPD Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan tiga tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan semangat keistimewaan di dalamnya.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Renstra Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah) adalah perubahan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun baik untuk mendukung visi / misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Perubahan Rencana strategi (Renstra) kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi provinsi merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah. Jika capaian rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah melebihi sasaran rencana strategi kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi (Renstra) provinsi maka, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa Perangkat Daerah (OPD) tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumberdaya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang ditempuh.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimanatelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintrah nomor 13 Tahun 2019

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis.

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2024-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Bab III Permasalahan dan isu-isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2024-2026

Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPD Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Tahun 2024-2026

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Struktur Organisasi

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5); Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagaimana Gambar 2.1. berikut ini:

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Berdasarkan Gambar 2.1.tersebut diatas, Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik , terdiri dari
 - a. Seksi Informasi, Aspirasi dan Saluran Komunikasi Publik
 - b. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informasi dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi komunikasi dan
 - c. Seksi Statistik
5. Bidang Persandian
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian
 - b. SeksiKeamanan Informasi dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistic dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut

- 1) Merumuskan program kerja Dinas komunikasi dan informatika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3) Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- 4) Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pekerjaan dapat berjalan lancar;;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 6) Mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- 7) Mengikuti Rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- 8) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas pokok membantu kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan, dalam lingkup Dinas. Berdasarkan tugas tersebut, Sekretaris memiliki fungsi;

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengoordinasian fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas mempunyai uraian tugas :

- 1) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas ;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- 5) menyusun rancangan, mngoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sikronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 8) mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian , dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- 9) melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- 10) melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 11) mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- 12) mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 13) mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- 14) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 15) mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketata laksanakan;
- 16) mengumpulkan bahan dan menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkup dinas;
- 17) mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 18) mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 19) mengeoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 20) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- 21) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan yaitu :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. Mengumpulkan bahan dan mensusun laporan kinerja Dinas

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

B. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelolah administrasi kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan pengklasifikasikan surat menurut jenisnya;

2. Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Berdasarkan tugas tersebut Kepala Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
3. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
4. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
5. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi public
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi sehingga berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Humas , Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kehumasan , informasi dan komunikasi publik;
7. Melaksanakan penyusunan norma, standar , prosedur dan criteria pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

8. Melaksanakan penyediaan akses informasi
9. Melaksanakan pelayanan informasi dan layanan hubungan media
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
 - a. Seksi Informasi, Aspirasi dan Saluran Komunikasi Publik**

Seksi Informasi, Aspirasi dan Saluran Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Humas, informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, penyusunan norma, standar, produser dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan , evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten kegiatan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi.
 - b. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik**

Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Humas, informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi kabupaten
 - c. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik**

Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Humas, informasi dan Komunikasi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media dikabupaten.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

3. **Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik**

Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas , mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik.
- b. Pengeoordinasian dan pelaksanaan Penyelenggaraan Aplikasi informatika dan Statistik
- c. Penyiapan perumusan kebijakan Penyelenggaraan Aplikasi informatika dan Statistik
- d. Pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Aplikasi informatika dan Statistik
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan Aplikasi informatika dan Statistik
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas hingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik
- d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi

Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan layanan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi

Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi dipimpin oleh Kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan sumber daya dan aplikasi teknologi informasi komunikasi.

c. Seksi statistik

Seksi statistik dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise , serta pemamtaun , evaluasi dan pelaporan terkait fungsi informasi statistik.

4. Bidang Persandian

Bidang persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas okok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Persandian mempunyai fungsi yaitu :

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- h. Pelaksanaan administrasi bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tugas pokok Kepala Bidang Persandian sebagai berikut :

- 1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi sehingga berjalan lancar.
- 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran kerja pegawai(SKP)
- 5. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- 6. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7. Melaksanakan tat kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan di lingkungan pemerintah daerah
- 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

a. Seksi tata Kelola persandian

Seksi tata Kelola persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantaun dan evaluasi serta pelaporan kegiatan tata kelola persandian.

b. Seksi Operasional Pengamanan Sandi

Seksi Operasional Pengamanan Sandi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang operasional pengamanan sandi

c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan persandian

Seksi Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan persandian dipimpin oleh Kepala Seksi menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia /Pegawai Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No.	Jabatan	PNS Golongan (orang)				L	P
		IV	III	II	I		
1	Kepala Dinas	1				1	
2	Sekretaris	1				1	
3	Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik		1			1	
4	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik	1					
5	Kepala Bidang Persandian					1	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

6	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan		1			1
7	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian		1		1	
8	Seksi Infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi		1			1
9	Seksi Kemitraan Pelayanan Informasi Publik		1		1	
10	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Layanan Publik Informasi		1		1	
11	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Aspirasi dan saluran komunikasi Publik		1		1	
12	Kepala Seksi Penyelenggaraan Statistik		1		1	
13	Kepala Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi publik		0		0	
14	Kepala Seksi tata Kelola Persandian		1		1	
15	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian		1		1	
16	Kepala Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggraan Persandian		1		1	
	Staf		21	4	4	10
	<i>Jumlah</i>	3	21	4	17	12
	Jumlah Total		28			

Tabel 2.2. Jumlah Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No.	Penempatan	L	P	Jumlah
	Sekretariat	3	5	8
2	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik	6	3	9
3	Bidang Bidang Apikasi Informatika dan Statistik	3	2	5
4	Bidang Bidang Persandian	5	3	8

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat					
2	SMP Sederajat		1			
3	SMA Sederajat	3	2	13	6	24
4	D3					
5	S1	11	9	5	9	34
6	S2	2				2
7	S3					

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	13	9	22
4	Golongan IV	3	0	3

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.5. Sumber Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sidenreng Rappang

NO	Jenis Sarana dan Prasaran	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	kurang Baik	Rusak Berat	
1	Gedung kantor	unit	1			1
2	Mobil	unit	2	1		3
3	Sepeda motor	unit	6			6
4	Mesin ketik	buah			1	1
5	Rak besi	buah	1	1		2
6	Filling Besi/Metal	buah	3			3
7	White Board	buah	1			1
8	Overhead Proyektor	buah	1			1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

9	Alat Kantor Lainnya (Converter Chassis)	buah	3			3
10	Alat Kantor Lainnya (Optical Distribution Cabinet)	buah	6			6
11	Alat Kantor Lainnya (Optical Termination Box)	buah	6			6
12	Alat Kantor Lainnya (Tiang Pole)	buah	6			6
13	Alat Kantor Lainnya (Fanel Box Outdoor)	buah	40			40
14	Alat Kantor Lainnya (Fingerprint door lock)	buah	1			1
15	Alat Kantor Lainnya (Nikon)	buah	2			2
16	Alat Kantor Lainnya (Fingerprint door lock)	buah	1			1
17	Genset	unit	1			1
18	Lemari Kayu	buah	5			5
19	Meja Resepsion	buah	1			1
20	Kursi Rapat	buah	12			12
21	Kursi Tamu	buah		1		1
22	Kursi Putar	buah	8			8
23	Bangku Tunggu	Set	2			2
24	Meja Biro	buah	4			4
25	Moubiler lainnya	buah	1			1
26	Rak TV	buah	1			1
27	Lemari Es	unit	2			2
28	AC	unit	13		1	14
29	Radio	unit			1	1
30	TV	unit	7		2	9
31	Wireless	buah	1			1
32	Microphone	buah			1	1
33	Camera Video	buah	1			1
34	Komputer PC	unit	12			12
35	Laptop	unit	5		2	7
36	Notebook	unit		1		1
37	Printer	unit	9		2	11
38	UPS	buah	41			41
39	Harddiks Eksternal	buah	3			3
40	Server	buah	1			1
41	Router	buah	42			42
42	Hub	buah	42			42
43	Peralatan Jaringan Lain-lain	buah	1			1
44	Switch Hub	buah	1			1
45	Wireless Access Point	buah	70			70
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	buah	1			1
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	buah		5		5
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	buah	15			15
49	Meja Kerja	buah	2			2
50	Meja Operator	buah	1			1
51	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	set	2			2

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	buah	1			1
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	buah	4			4
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	9			9
55	Kursi Tamu di ruangan pejabat eselon II	set	1			1
56	Kursi Tamu di ruangan pejabat eselon III	set		1		1
57	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	unit	6			6
58	Camera Profesional	unit	2		2	4
59	Proyektor + Attachment	unit			1	1
60	Video Tape Recorder Portable	buah	1			1
61	Video Mixer	buah	4	1		5
62	Tripod Cembra	buah	1	2		3
63	Lensa kamera	buah	2			2
64	Pesawat telephone	buah	2			2
65	Facsimile	unit	1			1
66	Unit pemancar VHF/FM Portable	buah			1	1
67	Camera drone	set		1		1
68	LCD Monitor	buah	3			3

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024-2026 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi kelompok sasaran pada Dinas Kominfo yaitu seluruh OPD dan Masyarakat.

Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel Review Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 2.3.1 Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK Dinas
Komunikasi dan informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	Urairan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator permendagri 86,18, dan SPM																		
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)																		
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)											1.79	2.36						
	Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet						78,97	83,83				77.05	77.05				97.53	92.83	
	Persentase luas wilayah yang terjangkau infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur lainnya						78,97	83,83				77.05	77.05				97.53	92.83	
	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Kerjasama media yang dikelola						57	79				57	79				100	100	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

NO	Uraian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	persentase data statistik yang dipublikasikan																		
	Persentase dokumen data / informasi dan statistik sektoral yang dihasilkan																		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100	100	100	100	100			100	100	100			100	100	100
	jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah						29	29				29	29				100	100	
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah						100	100				100	100				100	100	
	Persentase luas wilayah yang tercoverage Jaringan Internet				71,98	75,74	78,97	83,83				77,05	77,05				#VALUE!	100	
	predikat Nilai SAKIP			CC	CC	CC	B	B		C	CC	cc	cc						
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah							25					25				100	100	
	IKK																		
10.1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						100	100	100			100	100	100			100	100.00	100.00
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						75	100	100	75	100	75	100				100	100%	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						110	100				100	100				100	100%	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah						100	100				100	100				100	100%	
	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah						46	66				31.32	37.52				68.09	56.85	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 2.3.2 Pencapaian kinerja indikator permendagri 86 Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	Uraian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
No	Indikator Permendagri 86																		
10.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100.00	100.00	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi				75,45	75,87	76,80	78,87	79,67	70,05	71,47	75,74	77,05	77,05	93%	95%	97%	97%	97%
10.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet				80,21	81,95	82,23	82,45	82,98	69,47	66,05	69,67	70,17	77,21	86,25	81,5	84%	85%	93%
10.5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi				75	78	83	86	89	43,64	40,54	41,25	47,89	47,89	57,33	51%	49%	56%	53%
14.1	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Buku PDRB				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 2.3.3 Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan TPI / SDGs

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

lampiran 1

NO	Uraian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	PILAR EKONOMI																			
	(Tujuan 17. Kemitraan)																			
	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS						
	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS						
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS						
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS						
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS						
	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.						BPS	BPS	BPS			BPS	BPS	BPS						
	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband						92,01	92,6	93	0,79	78,54	82,89	90,15	91,66				90%	98%	98%
	Proporsi individu yang menggunakan internet.						80,5	81,5	82,5		66,5	69,67	71,21	79,3				86%	88%	96%

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 2.3.3 Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan TPI / SDGs

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Lampiran 2

NO	Uraian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					realisasi Capaian Tahun ke					Rasion Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
PILAR EKONOMI (Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)																			
	Laju pertumbuhan PDRB per kapita																		
	PDRB per kapita																		
PILAR EKONOMI (Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan)																			
	Indeks Kebebasan Sipil																		
PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)																			
	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband																		
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam																		
	Proporsi individu yang menggunakan internet																		
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)																			
	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.																		
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)																		
PILAR SOSIAL (Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas)																			
	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).																		
PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesetaraan Gender)																			
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.																		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 2.4 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2022

URAIAN	Anggaran pada tahun ke...				Realisasi Anggaran pada tahun ke...				Rasio antara realisasi dan				Rata-rata pertumbuhan	
	(x Rp. 1000)				(x Rp. 1000)				Anggaran Tahun ke.....				(x Rp. 1000)	
	1 (2019)	2 (2020)	3 2021	4 2022)	1 (2019)	2 (2020)	3 2021)	4 2022)	1 (2019)	2 (2020)	3 2021)	4 2022)	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	7	9	10	11	11	14		15	16	17	18
PENDAPATAN	392,740,000	392,740,000	476,423,000	542,740,000	476,423,000	443,766,000	446,250,000	463,636,000	121.31	112.99	93.67	85.43	1,804,643,000	1,830,075,000
Pendapatan Asli Daerah													-	
BELANJA DAERAH													-	
Belanja Tdk Langsung	2,112,818,000	2,245,670,000	2,197,378,000	2,224,823,000	2,031,303,771	2,223,729,495	2,107,439,976	2,161,966,004	96.14	99.02	95.91	97.17	8,780,689,000	8,524,439,246
Belanja Langsung	7,911,660,000	6,115,794,000	4,079,916,000	4,530,178,000	7,777,556,705	6,012,088,620	3,580,626,376	3,956,295,790	98.30	98.30	87.76	87.33	22,637,548,000	21,326,567,491

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	13	9	22
4	Golongan IV	3	0	3

2.2. 2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.5 Sumber Data Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

NO	Jenis Sarana dan Prasaran	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	kurang Baik	Rusak Berat	
1	Gedung kantor	unit	1			1
2	Mobil	unit	2	1		3
3	Sepeda motor	unit	6			6
4	Mesin ketik	buah			1	1
5	Rak besi	buah	1	1		2
6	Filling Besi/Metal	buah	3			3
7	White Board	buah	1			1
8	Overhead Proyektor	buah	1			1
9	Alat Kantor Lainnya (Converter Chassis)	buah	3			3
10	Alat Kantor Lainnya (Optical Distribution Cabinet)	buah	6			6
11	Alat Kantor Lainnya (Optical Termination Box)	buah	6			6
12	Alat Kantor Lainnya (Tiang Pole)	buah	6			6
13	Alat Kantor Lainnya (Fanel Box Outdoor)	buah	40			40
14	Alat Kantor Lainnya (Fingerprint door lock)	buah	1			1
15	Alat Kantor Lainnya (Nikon)	buah	2			2
16	Alat Kantor Lainnya (Fingerprint door lock)	buah	1			1
17	Genset	unit	1			1
18	Lemari Kayu	buah	5			5
19	Meja Resepsion	buah	1			1
20	Kursi Rapat	buah	12			12
21	Kursi Tamu	buah		1		1
22	Kursi Putar	buah	8			8
23	Bangku Tunggu	Set	2			2
24	Meja Biro	buah	4			4
25	Moubiler lainnya	buah	1			1
26	Rak TV	buah	1			1
27	Lemari Es	unit	2			2
28	AC	unit	13		1	14
29	Radio	unit			1	1
30	TV	unit	7		2	9
31	Wireless	buah	1			1
32	Microphone	buah			1	1
33	Camera Video	buah	1			1
34	Komputer PC	unit	12			12
35	Laptop	unit	5		2	7
36	Notebook	unit		1		1
37	Printer	unit	9		2	11
38	UPS	buah	41			41

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

39	Harddiks Eksternal	buah	3			3
40	Server	buah	1			1
41	Router	buah	42			42
42	Hub	buah	42			42
43	Peralatan Jaringan Lain-lain	buah	1			1
44	Switch Hub	buah	1			1
45	Wireless Access Point	buah	70			70
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	buah	1			1
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	buah		5		5
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	buah	15			15
49	Meja Kerja	buah	2			2
50	Meja Operator	buah	1			1
51	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	set	2			2
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	buah	1			1
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	buah	4			4
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	9			9
55	Kursi Tamu di ruangan pejabat eselon II	set	1			1
56	Kursi Tamu di ruangan pejabat eselon III	set		1		1
57	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	unit	6			6
58	Camera Profesional	unit	2		2	4
59	Proyektor + Attachment	unit			1	1
60	Video Tape Recorder Portable	buah	1			1
61	Video Mixer	buah	4	1		5
62	Tripod Cembra	buah	1	2		3
63	Lensa kamera	buah	2			2
64	Pesawat telephone	buah	2			2
65	Facsimile	unit	1			1
66	Unit pemancar VHF/FM Portable	buah			1	1
67	Camera drone	set		1		1
68	LCD Monitor	buah	3			3

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 3 (tiga) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang .

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappangseperti pada tabel berikut ini.

1. Belum tersosialisasikannya ke Masyarakat Layanan Aduan Seperti SPAN Lapor, Baruga dan SIAPP
2. Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Kurang Optimalnya Produksi Informasi Pemerintah berupa berita dan Video sinematik
4. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
5. Belum optimalnya pelayanan media komunikasi publik (Media Cetak, Online dan Elektronik)
6. Bandwich Internet belum mencukupi kebutuhan pemerintah
7. Terbatasnya infrastruktur jaringan internet
8. Kurangnya Fasilitas pusat data (Server)

9. Kurangnya penggunaan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Sertifikasi Elektronik dari BsrE
10. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki skill baik di bidang teknologi informasi maupun keamanan informasi
11. Rendahnya jumlah SDM yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknologi Informasi (TI)

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagaiberikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik dan teknologi informatika.
2. Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
3. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
4. Maraknya Berita Hoaks
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian
6. Perkembangan Teknologi Informasi
7. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi dan informasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik
2. Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik
3. Meningkatkan kualitas ketersediaan dan keamanan Informasi

Sasaran

1. Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet
2. Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan kerjasama media massa
3. Meningkatnya Tata kelola kinerja dan keuangan
4. Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah
5. Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 4.1. Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

No	RPD		Renstra PD	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan Komunikasi Publik 2. Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik 3. Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan Keamanan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jangkauan Infrastruktur jaringan internet. 2. Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa 1. Meningkatnya data/informasi / statistic sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan 2. Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah 1.. Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika selama 3 (tiga) tahun kedepan diuraikan pada tabel berikut ini.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 25.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2.5	2.8	3
		Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	85,78 %	87,70%	90,40%
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola	100%	100%	100%
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	CC	B	B
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan data statistik		Persentase data statistik yang dipublikasikan	100	100	100
		Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	75%	85%	100%
3	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan Informasi		Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan	50	60	80
		Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	2 insiden	2 insiden	1 insiden

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel TC 25.2 Target Tujuan Pembangunan berkelanjutan / Sustainable Development Goal (TPB/ SDGs)

No	Indikator SDGS	Kondisi Awal	Target		
			2024	2025	2026
outcome	PILAR EKONOMI (Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan)				
1.1					
1.2	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik	BPS	BPS	BPS	BPS
1.3	Persentase konsumen yang menjadikan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik	BPS	BPS	BPS	BPS
outcome					
3.1	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses	BPS	BPS	BPS	BPS
3.2	Persentase konsumen yang puas terhadap	BPS	BPS	BPS	BPS
3.3	Tingkat penetrasi akses tetap pital lebar (fixed)				
3.4	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	91,66	92,01	92,6	93
3.5	Proporsi individu yang menggunakan internet.	79,3	80,5	81,5	82,5
3.6	PILAR EKONOMI (Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)				
3.7	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.				
3.8	PDRB per kapita.				
3.9	PILAR EKONOMI (Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan)				
3.10	Indeks Kebebasan Sipil.				
3.11	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)				
3.12	Proporsi penduduk yang terlayani mobile	91,66	92,01	92,6	93
3.13	Proporsi individu yang menguasai/memiliki	91,66	92,01	92,6	93
3.14	Proporsi individu yang menggunakan internet	79,3	80,5	81,5	82,5
outcome	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang ta				
3.4	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2 org	3 org	4 org	4 org
3.5	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				
3.6	PILAR SOSIAL (Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas)				
outcome	Proporsi remaja dan dewasa dengan				
outcome	PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesetaraan Gender)				
1.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki	79,3	80,5	81,5	82,5

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024– 2026.

No.	Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik	Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif bagi pemerintah desa / kelurahan	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi lainnya
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	SDM yang memadai dan memiliki kompetensi IT	Meningkatkan kompetensi dengan melalui pelatihan dan pembinaan SDM
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Optimalisasi penyebaran informasi publik dan kerjasama media massa	Penambahan frekuensi penyebaran informasi public

		Meningkatnya tata kelola kinerja dan Keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan data statistik	Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	Ketersediaan SDM yang memadai	Penyelenggaraan otorisasi statistik
			Pengelolaan aplikasi satu data	penyelenggaraan portal satu data
3	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan Informasi	Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	panduan dan prosedur tata kelola keamanan sistem informasi berbasis elektronik yang sesuai standar	Penyediaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD selain yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Tabel 5.2 Maktriks dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					PROGRAM
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3
1	Meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik	Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif bagi pemerintah desa / kelurahan	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi lainnya	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi lainnya	Pembangunan infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi lainnya			1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	SDM yang memadai dan memiliki kompetensi IT	Meningkatkan kompetensi dengan melalui pelatihan dan pembinaan SDM	Meningkatkan kompetensi dengan melalui pelatihan dan pembinaan SDM	Meningkatkan kompetensi dengan melalui pelatihan dan pembinaan SDM			2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan Keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten

2	Meningkatkan kualitas Pelayanan data statistik	Tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	Ketersediaan SDM yang memadai	Penyelenggaraan otorisasi statistik	Penyelenggaraan otorisasi statistic	Penyelenggaraan otorisasi statistik			⁴ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Pengelolaan aplikasi satu data	penyelenggaraan portal satu data	penyelenggaraan portal satu data	penyelenggaraan portal satu data			
3	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan Informasi	Meningkatnya Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	panduan dan prosedur tata kelola keamanan sistem informasi berbasis elektronik yang sesuai standar	Penyediaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Penyediaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Penyediaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi			⁵ Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIP)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2024-2026.

6.1. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan di bidang Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian.

Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 akan direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasin Publik

Sub Keegiatannya adalah

- Pengeloan konten dan perencanaan media komunikasi publik
- Pelayanan informasi publik
- Layanan hubungan media

2. Program Aplikasi Informatika

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Keegiatannya adalah

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah

2.2 Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keegiatannya adalah

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

3.1 Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Daerah Kabupaten / kota

Sub Keegiatannya adalah

- Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan , Pengelohan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

4. Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah (PPIPD)

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota

Sub Keegiatannya adalah

- Penetapan kebijakan Tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelohan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

4.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

5.1 Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD

5.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

- PenataUsahaan Barang Milik Daerah

5.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Keegiatannya adalah :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

5.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah

Sub Keegiatannya yaitu

- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut :

TABEL T.C.27

Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

KODE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN ,PROGRAM (QUTCOME) DAN KEGIATAN (QUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
						TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.				
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			100	5,390,508, 368	100	5,439,413, 451	100	5,488,807, 586	100	5,488,807, 586		
	Meningkatka n akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik		BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Program Pengelolaan Informasi komunikasi publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100.00	513,356,000.00	100.00	515,356,000.00	100.00	516,356,000.00	100.00	516,356,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelola	98,58	100.00	513,356,000.00	100.00	515,356,000.00	100.00	516,356,000.00	100.00	516,356,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	670	480 dokumen	151,227,000.00	480 dokumen	153,227,000.00	480 dokumen	154,227,000.00	480 dokumen	154,227,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	8	25 dokumen	72,129,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6	3 layanan	290,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

		Meningkatkannya jangkauan Infrastruktur jaringan internet	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	81,92	100.00	2,357,516,000	100.00	2,359,516,000	100.00	2,362,516,000	100.00	2,362,516,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintarah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	78,33	100.00	2,003,350,000	100.00	2,005,350,000	100.00	2,008,350,000	100.00	2,008,350,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 domain	10 dokumen	2,009,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	300 mbps	50 unit	2,001,341,000	50 unit	2,003,341,000	50 unit	2,006,341,000	50 unit	2,006,341,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan	98,90	100.00	354,166,000	100.00	354,166,000	100.00	354,166,000	100.00	354,166,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	155 menara	1 dokumen	13,719,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	140 perangkat	1 unit	3,116,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	5 aplikasi	5 unit	337,331,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

	Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik		BIDANG URUSAN STATISTIK											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
		tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten / Kota	persentase data statistik yang tersedia		100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	100.00	63,492,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik sektoral		5 dokumen	13,492,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKALAJENE SIDENRENG						

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Penyelenggara n Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun		1 doku men	50,000,00 0.00	1 doku men	50,000,00 0.00	1 doku men	50,000,00 0.00	1 dokumen	50,000,00 0.00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
			BIDANG URUSAN PERSANDIAN												
	Meningkatka n kualitas,kete rsediaan dan keamanan informasi		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	37.52	64.00	57,992,00 0.00	65.00	58,591,00 0.00	66.00	58,741,00 0.00	66.00	58,741,00 0.00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
		Meningk atnya Pengama nan Sistem Pemerint ah	Kegiatan Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	91,14	100.0 0	8,760,000. 00	100.0 0	9,359,000. 00	100.0 0	9,509,000. 00	100.00	9,509,000. 00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG
		Berbasis Elektroni k (SPBE)	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten	1	1 doku men	1,901,000. 00	1 doku men	2,500,000. 00	1 doku men	2,650,000. 00	1 dokumen	2,650,000. 00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA	PANGK AJENE SIDENR ENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	/ Kota yang Ditetapkan											
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	1	2 laporan	1,601,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	4	4laporan	1,233,000.00	4laporan	1,233,000.00	4laporan	1,233,000.00	4laporan	1,233,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	2	29 perangkat daerah	4,025,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi	100	100.00	49,232,000.00	100.00	49,232,000.00	100.00	49,232,000.00	100.00	49,232,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	49,232,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100.00	2,398,152,368.00	100.00	2,442,458,451.00	100.00	2,487,702,586.00	100.00	2,487,702,586.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	100	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,500,000	100	7,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4 dokumen	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2 dokumen	4,000,000	2 dokumen	4,000,000	2 dokumen	4,500,000	2 dokumen	4,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2,142,468,368	100	2,162,774,451	100	2,173,468,586	100	2,173,468,586	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	24 orng / 12 bulan	2,139,468,368	24 orng / 12 bulan	2,159,774,451	24 orng / 12 bulan	2,169,468,586	24 orng / 12 bulan	2,169,468,586	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5	5 laporan	3,000,000	5 laporan	3,000,000	5 laporan	4,000,000	5 laporan	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	96,61	100	45,144,000	100	63,144,000	100	93,644,000	100	93,644,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG
			Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	4 paket	500,000	4 paket	500,000	4 paket	1,000,000	4 paket	1,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	4 paket	1,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGK AJENE SIDENRENG						

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 dokumen	13,644,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58	12 laporan	30,000,000	12 laporan	48,000,000	12 laporan	78,000,000	12 laporan	78,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	138,500,000	100	144,500,000	100	148,000,000	100	148,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4 laporan	1,500,000	4 laporan	1,500,000	4 laporan	2,000,000	4 laporan	2,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 laporan	75,000,000	12 laporan	78,000,000	12 laporan	79,000,000	12 laporan	79,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 laporan	62,000,000	12 laporan	65,000,000	12 laporan	67,000,000	12 laporan	67,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	65,040,000	100	65,040,000	100	65,090,000	100	65,090,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	15 unit	56,040,000	15 unit	56,040,000	15 unit	56,090,000	15 unit	56,090,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 unit	9,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PANGKAJENE SIDENRENG						
			JUMLAH				5,390,508,368		5,439,413,451		5,488,807,586		5,488,807,586		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome progam pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal 2021/2022	Target			Kondisi Akhir
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Komunikasi dan Informatika					
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2.36	2.5	2.8	3	3

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

	persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	83%	85.78	87.70	90.40	90.40
	persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola	100%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Predikat Nilai Sakip	CC	CC	B	B	B
	Urusan Statistik					
	Persentase Data statistik yang dipublikasikan	100	100.00	100.00	100.00	100.00
	persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	Baru	75.00	85.00	100.00	100.00
	Urusan Persandian					
	Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan	25	50.00	60.00	80.00	80.00
	jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	2	2.00	2.00	1.00	1.00

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal 2021/2022	Target			Kondisi Akhir
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75	85.78	87.70	90.40	90,40
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100.00	100.00	100.00	100
	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	37.52	64	65	66	66

Tabel 7.3. Indikator Permendagri 86 Tahun 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No	Indikator Permendagri 86	Kondisi awal	Target		
		2022	2024	2025	2026
10.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan		100	100	100
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	77.05	80	80	90
10.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	79,12	81	87	92

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

10.5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	48,50	50	56	60
14.1	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	ada	Ada	ada	Ada
14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada	Ada	ada	Ada
14.3	Buku PDRB	ada	Ada	ada	Ada
15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100	100	100	100

Tabel 7.4. Indikator Permendagri 18 Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No	Indikator Permendagri 18	Kondisi Awal	Target		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
outcome	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Iternet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100
1.1	Presentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disdiakan Oleh Kominfo	100	100	100	100
1.2	Presentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disdiakan Oleh Kominfo	100	100	100	100
1.3	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah Yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara,Video,Teks, Data Dan Sinyal Lainnya) Dengan Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah		ada	ada	ada
outcome	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

3.1	Persentase Kegiatan (Event) Perangkat Daerah Dan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Yang Dimanfaatkan Secara Daring Dengan Memanfaatkan Domain Dan Subdomain Instansi Penyelenggaraan Negara Sesuai Dengan Pm Kominfo No 5/2015	81.4	100	100	100
3.2	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal Dan Situs Web Yang Sesua Standar	27.5	50	60	80
3.3	Presentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum Dan Aplikasi Khusus Yang Ditetapkan Sesuai Peraturan Perundang Undangan	27.5	50	60	80
3.4	Persentase Layanan Spbe (Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Tercantum Dalam Dokumen Bisnis Yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik	belum ada	20	50	80
3.5	Persentase Layanan Spbe (Layanan Publik Dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	belum ada	50	60	80
3.6	Persentase Sistem Elektronik Yang Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100
3.7	Persentase Layanan Publikdan Layanan Administrasi Yang Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100	100	100	100
3.8	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	27.05	100	100	100
3.9	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyimpan Data Di Pusat Data Pemerintah	10	55	70	100
3.10	Persentase Perangkat Daerah Yang Memperbaharui Datanya Sesuai Sikulus Jenis Data (Sesuai Renstra Kominfo)	10	55	70	100
3.11	Persentase Data Yang Dapat Berbagi Pakai	belum ada	30	50	80
3.12	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Inovasi Yang Mendukung Smart City	belum ada	30	50	80

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

3.13	Persentase Asn Pengelola Tik Yang Tersertifikasi Kompetensi Dibawah Pengelolaan Dinas Kominfo	50	100	100	100
3.14	Tersedianya Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E Government	ada	ada	ada	ada
outcome	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91	70	70	70
3.4	Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Menyebarkan Informasi Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Kab/Kota		50	50	50
3.5	Persentase Konten Informasi Terkait Program Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Sesuai Dengan Strategi Komunitas (Strakom)	90	100	100	100
3.6	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (Strakom) Dan Sop Yang Telah Ditetapkan	tidak ada			
outcome	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100
outcome	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	ada	ada	ada	ada
1.1	Tersedianya Buku Profil Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Jumlah Survei Statistik Sektoral Yang Dilakukan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.3	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Dilakukan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.4	Jumlah Survei Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi BPS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.5	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi Dari BPS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

1.6	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.7	Persentase Kelengkapan Metadata Variabel Dari Kegiatan Statistik	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
outcome	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	37.52	64	65	66
1.1.	Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan	100	100	100	100
1.2	Presentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamanankan Melalui Kegiatan pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan	100	100	100	100
1.3	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Yang Telah Menerapkan Prinsip2 Manajemen Keamanan Informasi (Smki) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah	25	50	60	80
1.4	Presentase System Elektronik/Asset Informasi Yang Telah Di Audit Dengan Resiko Kategori Rendah	tidak ada	50	70	80
1.5	Presentase Titik Yang Diamankan Dibanding Dengan Jumlah Seluruh Titik Pada Pemerintahan Daerah Berdasarkan Polahubungan Komunikasi Sandi (Phks) Yang Ditetapkan	100	100	100	100

Tabel 7.5. Indikator Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Kode	OPD/URUSAN/Program	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2022	Target			Kondisi Akhir
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

2.16.02	Program Pengelolaan Informasi komunikasi public	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100.00	100.00	100.00	100.00
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	81,92	100.00	100.00	100.00	100.00
2.20	BIDANG URUSAN STATISTIK						
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100	100.00	100.00	100.00	100.00
2.21	BIDANG URUSAN PERSANDIAN						
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	37.52	64.00	65.00	66.00	66.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100.00	100.00	100.00	100.00

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Tabel 7.5. Indikator Tujuan Berkelanjutann SDGs pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

INDIKATOR SDGs					
No	Indikator SDGs	Kondisi Awal	Target		
			2024	2025	2026
outcome	PILAR EKONOMI (Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan)				
1.1					
1.2	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	BPS	BPS	BPS
1.3	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	BPS	BPS	BPS
outcome	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	BPS	BPS	BPS
3.1	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	BPS	BPS	BPS
3.2	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	BPS	BPS	BPS
3.3	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.				
3.4	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	91,66	92,01	92,6	93
3.5	Proporsi individu yang menggunakan internet.	79,3	80,5	81,5	82,5
3.6	PILAR EKONOMI (Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)				
3.7	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.				
3.8	PDRB per kapita.				
3.9	PILAR EKONOMI (Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan)				
3.10	Indeks Kebebasan Sipil.				
3.11	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)				
3.12	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	91,66	92,01	92,6	93
3.13	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	91,66	92,01	92,6	93
3.14	Proporsi individu yang menggunakan internet	79,3	80,5	81,5	82,5
outcome	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)				
3.4	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2 org	3 org	4 org	4 org
3.5	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

3.6	PILAR SOSIAL (Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas)				
outcome	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				
outcome	PILAR SOSIAL (Tujuan 5. Kesenjangan Gender)				
1.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	79,3	80,5	81,5	82,5

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024—2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Sidenreng Rappang, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini serta melakukan penyesuaian dengan konsultasi dengan Pusat (Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan Kemendagri). Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Selanjutnya Perubahan rencana strategis 2024-2026 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 3 tahun kedepan.
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD.

Pangkajene Sidenreng ,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H. BACHTIAR, S.Hi, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 196012310198603 1 048

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

<p>TUJUAN 1 Meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik</p> <p>INDIKATOR : Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet.</p>	<p>SASARAN 1 OPD:Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa</p> <p>INDIKATOR :persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola</p>	<p>PROGRAM 1 : Pengelolaan Informasi komunikasi publik</p> <p>INDIKATOR : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p>	<p>KEGIATAN 1:Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / kota</p> <p>INDIKATOR : Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelola</p>	<p>Sub Kegiatan 1: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</p> <p>Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</p>	
				<p>Sub Kegiatan 2: Pelayanan Informasi Publik</p> <p>Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</p>	
				<p>Sub Kegiatan 3: Layanan Hubungan Media</p> <p>Indikator :Jumlah Layanan Hubungan Media</p>	
				<p>Sub kegiatan 4 :Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator :Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	
				<p>Sub Kegiatan 5 :Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</p> <p>Indikator:Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</p>	
		<p>SASARAN 2 OPD:Meningkatnya jangkauan Infrastruktur jaringan internet</p> <p>INDIKATOR :persentase luas wilayah yang terjangkau infrastruktur jaringan internet</p>	<p>PROGRAM 2 : Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>INDIKATOR : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p>	<p>KEGIATAN 2: Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintrah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>INDIKATOR : Persentase domain dan sub domain yang dikelola</p>	<p>Sub Kegiatan 6 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>
				<p>Sub Kegiatan 7 : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola</p>	
				<p>Sub Kegiatan 8 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>Indikator : jumlah aplikasi dan proses bisnis pemeintah berbasis elektronik yang dikembangkan</p>	
		<p>SASARAN 4 OPD:tersedianya data statistik sektoral dalam portal satu data</p> <p>INDIKATOR :persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah</p>	<p>PROGRAM 3 : Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>INDIKATOR : persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan</p>	<p>KEGIATAN 3: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>INDIKATOR : Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan</p>	<p>Sub Kegiatan 9 :Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</p> <p>Indikator :Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik sektoral</p>
	<p>TUJUAN 2 Meningkatkan kualitas , Pelayanan data statistik</p> <p>INDIKATOR : Persentase Data statistik yang dipublikasikan</p>			<p>KEGIATAN 4: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten / kota</p> <p>INDIKATOR : Persentase Data Statistik yang tersedia</p>	<p>Sub Kegiatan 10 : Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah</p> <p>Indikator : Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun</p>

TUJUAN 3 Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan informasi

INDIKATOR : Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan

SASARAN 5 OPD: Meningkatkan Pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR : Jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

PROGRAM 1 : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

INDIKATOR : Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah

KEGIATAN 6: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

INDIKATOR : Persentase yang telah menggunakan pola jaringan komunikasi sandi

KEGIATAN 5 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah

INDIKATOR : persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian

Sub Kegiatan 11 : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten /
Sub Kegiatan 12: Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota
Sub Kegiatan 13 : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indikator : jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Sub kegiatan 14 : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi
Sub Kegiatan 15 :Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

